

kiprah agroforestri

World Agroforestry Centre (ICRAF) Indonesia

Volume 3, No. 2 - Agustus 2010

daftar isi



- 3 Hutan Desa Lubuk Beringin:
Skenario konservasi Kabupaten
Bungo
- 6 Potret kearifan lokal dalam tata
kelola keanekaragaman hayati
- 8 Gaharu:
Pohon emas yang misterius
- 10 Hutan Sesaot:
Jasa lingkungan yang belum
tersingkap
- 12 Berbagi pengalaman uji coba
perangkat kaji cepat dalam
menilai lansekap
- 14 Konferensi ASFN 2010:
Meningkatkan peran Asean di dalam
perhutanan sosial dalam berkontribusi
pada ketahanan pangan dan di dalam
menghadapi perubahan iklim

Hutan dengan beragam atribut, fungsi dan manfaatnya sudah tidak terbantahkan oleh siapapun. Hutan tidak saja dibicarakan sebagai sumberdaya ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya. Hutan sering juga dilukiskan bagaikan sebuah istana yang ditilami daun-daun kering yang lunak dan agak lembab. KIPRAH edisi kali ini dimulai dengan artikel mengenai skenario pelestarian hutan di salah satu kabupaten di propinsi Jambi. Tidak hanya hutan namun keanekaragaman hayati didalamnya juga penting untuk dilestarikan. Faktor apakah yang mempengaruhi kepunahannya? Menarik juga untuk membaca kondisi terkini keanekaragaman hayati dari sudut pandang wanita di Desa Danau, Tebing Tinggi dan Lubuk Beringin, kabupaten Bungo, Jambi.

Cerita dari wilayah Timur dari Desa Pusuk, Mataram, Nusa Tenggara Timur akan membawa imajinasi kita kepada pohon emas misterius, pohon apakah itu? Indonesia adalah negara pengekspor terbesar pohon misterius ini, namun dari sisi pelestarian, tidak sekemilau harga dan aroma pohonnya. Cerita menarik ini juga dilanjut dengan kisah keindahan alam di kawasan wisata Aek Nyet di Hutan Sesaot, Lombok Barat, akan membawa kita pada indahnya masa kanak-kanak kala bermain di sejuhnya udara dan jernihnya air. Upaya dan usaha apa yang sudah dan akan diterapkan masyarakat sekitar untuk mempertahankan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut?

INAF (International Network of Friends of Agroforestry) sebuah nama baru yang berisi sekumpulan peserta yang hadir pada acara semiloka TUL-SEA yang diselenggarakan oleh ICRAF dan Universitas Hohenheim, Jerman dengan beberapa mitra lainnya. Peserta semiloka merasakan manfaat yang baik karena berkesempatan berbagi pengalaman antar peserta dalam uji coba alat bantu untuk evaluasi jasa lingkungan. Ikuti cerita lengkapnya di dalam.

Edisi KIPRAH kali ini ditutup dengan artikel dari ASEAN Social Forestry Network yang telah menyelenggarakan konferensi dan sidang tahunan yang ke empat. ICRAF turut berpartisipasi dengan menyampaikan rekomendasi dari perspektif metode. Konferensi ini dibuka oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, yang dalam sambutannya juga menitikberatkan mengenai kondisi kritis kehutanan Indonesia dan menghimbau masyarakat untuk memperbanyak aktifitas rehabilitasi hutan dan penegakkan hukum yang jelas.

Isu pelestarian hutan dan lingkungan sudah sedemikian penting dan membahana di seluruh negara di dunia ini. Sudahkah anda menyumbang untuk kelestarian hutan dan lingkungan kita?

Tikah Atikah



Sawah di bagian lembah yang subur, terletak diantara kebun campur berbasis kopi yang merupakan sumber pendapatan utama petani di desa Sumberagung (Ngantang, Malang-Jatim). Luasan sawah akan terancam menurun dengan meningkatnya kebutuhan pakan ternak, walaupun rumput gajah telah banyak ditanam dalam kebun campur (Foto: Kurniatun Hairiah)

kiprah agroforestri

Redaksional

Kontributor

Amelia Britaniari, Asep Ayat, Bambang Soeharto,
Diah Wulandari, Erik Setiawan, Harti Ningsih,
Ni'matul Khasanah, Kurniatun Hairiah, Noviana Khususiyah,
Subekti Rahayu, Tonni Asmawan

Editor

Jusupta Tarigan, Subekti Rahayu, Tikah Atikah

Desain dan Tata Letak

Josef Arinto

Foto Sampul

Grace Villamor



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

World Agroforestry Centre

ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115

PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia

☎ 0251 8625415; fax: 0251 8625416

✉ icraf-indonesia@cgjar.org

www.worldagroforestry.org/sea

Agroforestri adalah sistem pemanfaatan lahan yang memadukan pohon dengan tanaman lain dan/atau ternak

Kami mengajak pembaca untuk berbagi cerita dan pendapat mengenai agroforestri. Silahkan kirim naskah tulisan (500-1000 kata) disertai foto beresolusi besar. Saran dan kritik juga dapat ditulis didalam blog KIPRAH di <http://kiprahagroforestri.blogspot.com/>

Hutan Desa Lubuk Beringin: Skenario konservasi kabupaten Bungo

Oleh Asep Ayat dan Jusupta Tarigan

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa (Lembaga Desa) dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pembentukan Hutan Desa atas dasar pertimbangan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi. Status kawasan belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan dan berada di wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Kriteria tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Hak pengelolaan hutan desa ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Evaluasi akan dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak (PP No 6 Tahun 2008).

Manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai harganya karena dapat menjadi sumber kehidupan bagi manusia, baik secara langsung, misalnya sebagai sumber kayu bangunan, rotan, bahan makanan nabati dan hewani, penghasil getah dan obat-obatan, maupun secara tidak langsung misalnya sebagai pengatur tata air, pengatur iklim dan tempat hidup bagi berbagai jenis hewan yang berperan sebagai penyerbuk, pemangsa dan penyeimbang ekosistem lainnya. Potensi hutan sebagai sumberdaya alam, seharusnya tidak hanya memberikan manfaat bagi sejumlah kecil orang tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga mereka dapat berperan dalam membantu kelestariannya.

Ironisnya, justru masyarakat di sekitar hutan hanya memperoleh manfaat yang tidak seberapa dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kehidupan ekonomi mereka kadang memprihatinkan. Bahkan rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar hutan menjadi alasan klasik terjadinya kerusakan hutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilakukan dengan mengambil manfaat langsung dan tidak langsung dari keberadaan hutan. Sebagai contoh, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari imbal jasa lingkungan bagi yang telah berperan dalam melestarikan hutan ataupun memperoleh manfaat dari hasil hutan non kayu. Apabila

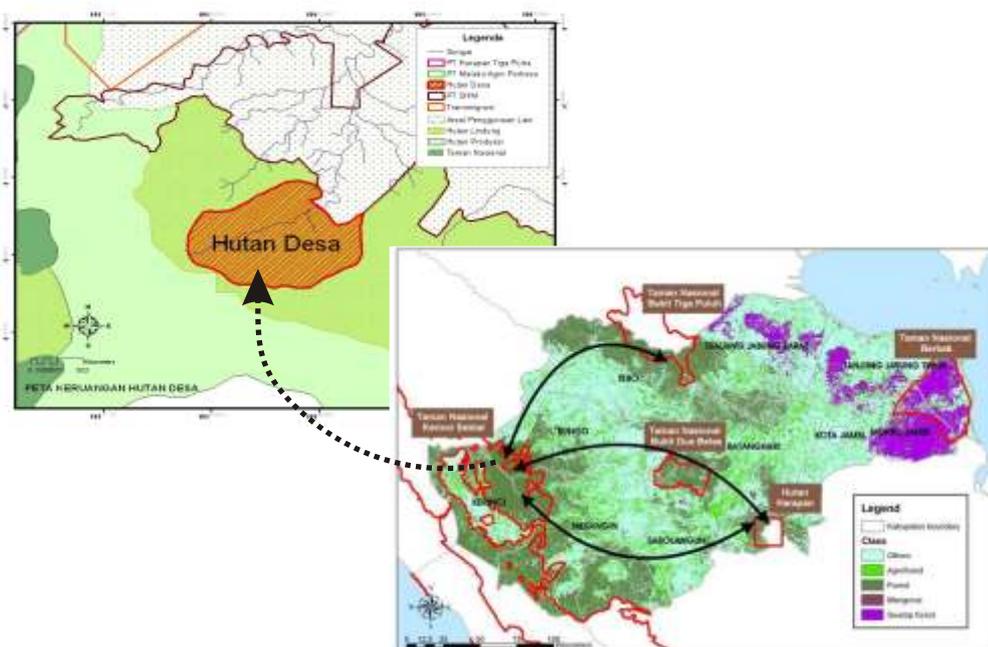
hutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya maka masyarakatpun tidak segan-segan mendukung upaya pelestarian hutan. Oleh karena itu kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menjadi tolok ukur dari upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan.

Paradigma baru pembangunan kehutanan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian hutan adalah membenahi kebijakan pembangunan di bidang kehutanan dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah yang memungkinkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan serta mempertimbangkan kemampuan produksi dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Melalui

pembenahan kebijakan pembangunan di bidang kehutanan, diharapkan hutan dapat menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya yang jumlahnya semakin meningkat.

Kebijakan bidang kehutanan yang selama ini hanya memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan besar telah mengesampingkan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mereka hanya menjadi penonton dari kegiatan eksploitasi hutan, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk melakukan perambahan di kawasan hutan, apalagi adanya tuntutan atas kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum.



Posisi hutan desa di antara TNKS, TNBT, TNBD dan Hutan Harapan

Perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang mengarah pada pendekatan berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *community based resources management (CBRM)* merupakan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui pendekatan CBRM, masyarakat diberi kesempatan untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan hutan dan menjaga kelestarian hutan. Salah satu implementasi dari perubahan kebijakan pembangunan kehutanan tersebut adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha. KKI-Warsi merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai fasilitator pada inisiasi dari upaya ini.

Kawasan hutan di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa. Desa ini dianggap berhasil mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alamnya, melalui model agroforestri karet, sawah organik, tanam padi serentak, pembibitan karet, lubuk larangan serta perlindungan kawasan hutan lindung dan taman nasional. Kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat langsung berupa getah karet, buah-buahan, rotan, bambu dan hasil tanaman pertanian, maupun manfaat tidak langsung seperti ketersediaan air yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik desa. Meskipun belum ada sambungan listrik dari pemerintah, Desa Lubuk Beringin telah mampu menerangi desanya tanpa harus dipungut biaya.

Adanya bukti bahwa dengan melestarikan hutan, ketersediaan air tetap terjaga sehingga listrikpun tetap mengalir di desanya maka masyarakat Desa Lubuk Beringin mau berperan dalam upaya melestarikan kawasan hutan yang tersisa di desanya. Mereka pun berprinsip "Hutan hilang, listrikpun padam".

Hutan desa dalam skenario konservasi

Hasil penelitain ICRAF menunjukkan bahwa luasan hutan yang tersisa di

Tabel keanekaragaman hayati di Hutan Desa Lubuk Beringin

Keanekaragaman hayati	Jumlah spesies	Kategori	Sumber data
Tumbuhan	971		ICRAF 2004-2007
Mamalia	37	9 spesies terancam punah	
Kalong	10		
Burung	167	28 spesies dilindungi; 10 termasuk dalam daftar CITES	KKI-Warsi 2009-2010
Burung	87	34 spesies dilindungi PP No. 7 tahun 1999; 23 spesies terancam punah	
Mamalia	12		

Kabupaten Bungo sangat sedikit dan terletak pada daerah yang tidak layak untuk dikonversi menjadi jenis penggunaan lain, antara lain pada daerah yang memiliki kelerengan tajam. Dalam buku "Belajar dari Bungo" tahun 2008, Ekadinata dan Vincent melaporkan bahwa saat ini tutupan hutan di Kabupaten Bungo tidak lebih luas dari perkebunan monokultur, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya luas perkebunan terus meningkat hingga melampaui luas hutan, terutama sejak tahun 1999.

Pemanfaatan lahan melalui konversi hutan seharusnya bukan lagi menjadi pilihan yang tepat untuk Kabupaten Bungo. Perencanaan tataguna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang menitik beratkan pada pemanfaatan lahan secara lestari perlu dipertimbangkan, sehingga tutupan bentang lahan Kabupaten Bungo memungkinkan menjadi koridor bagi taman nasional yang ada.

Dari perspektif konservasi, Kabupaten Bungo berada di empat wilayah strategis kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Kerinci Sibelat (TNKS), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) dan Kawasan Restorasi Harapan Rain Forest (Gambar 1). Dengan demikian, Kabupaten Bungo berpotensi menjadi penghubung antara kawasan konservasi tersebut apabila dikelola dengan skema dan inisiatif yang dapat mempertahankan kelestarian kawasan yang ada. Ditetapkannya areal hutan desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha merupakan langkah yang tepat untuk

mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dengan harapan dapat menjadi koridor antara kawasan hutan lainnya di Kabupaten Bungo.

Peranan hutan desa sebagai koridor dapat dijadikan skema konservasi dengan pendekatan lanskap mosaik, yaitu dengan menempatkan mosaik-mosaik hutan dalam suatu bentang lahan. Penempatan mosaik hutan diharapkan dapat berfungsi sebagai koridor atau penghubung pada kawasan yang telah terfragmentasi. Seperti kita ketahui bahwa kawasan hutan desa ini kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Penelitian yang dilakukan oleh ICRAF dan KKI-Warsi mencatat beberapa jenis spesies yang ditemukan di kawasan hutan desa ini (Tabel 1).

Selain sebagai koridor, skema hutan desa juga berkaitan dengan keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya hutan khususnya di Kabupaten Bungo. Kawasan hutan desa menyediakan sumber benih dan bibit tanaman budidaya dan obat, protein nabati dan hewani, bahan bangunan dan kerajinan. Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat karena kawasan ini merupakan bagian hulu yang mempunyai fungsi penting bagi sub DAS Batang Bungo. Sub DAS ini sendiri merupakan penyangga kehidupan masyarakat dalam fungsinya sebagai pengatur tata air yaitu sebagai sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan serta perikanan, MCK, sarana transportasi pengangkut hasil karet, sumber energi bagi PLTKA. Dalam kaitannya dengan isu pemanasan global, pengelolaan hutan desa diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi warga desa, tetapi juga

bagi dunia melalui perannya dalam pengurangan emisi gas CO₂.

Meskipun pada kenyataannya harapan untuk menjadi koridor tersebut masih sangat jauh, tetapi paling tidak keberadaan Hutan Desa di dalam Hutan Lindung Rantau Bayur bisa menjadi daerah penyangga kawasan TNKS. Selain itu, Hutan Desa yang diinisiasi dengan memposisikan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan kawasan hutan, maka mereka dapat mengakses sumberdaya alam dan memanfaatkannya untuk kehidupan, tetapi bukan sebagai pemilik kawasan. Tentunya dalam memanfaatkan hutan desa harus ada aturan-aturan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dengan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat di sekitar hutan sehingga tujuan konservasi dan menyejahterkan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pendampingan dari LSM, peneliti atau pemerintah masih sangat diperlukan untuk mengawal ide cemerlang ini menjadi kenyataan.

Peran pemerintah dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan desa

Meskipun hutan desa memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan dan sosial, namun pada pelaksanaannya, pengajuan izin Hutan Desa terbentur pada proses birokrasi. Hal ini mengakibatkan realisasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat jauh dari target. Pengajuan izin Hutan Desa

lebih rumit dan panjang dibandingkan dengan pengajuan HTI atau perkebunan. Setidaknya pengajuan harus melewati 13 tahap mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat dengan melalui 3 proses verifikasi di lapangan. Baru-baru ini pemerintah telah melakukan perubahan peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa (P 14/Menhut-II/2010) yang bertujuan untuk mempercepat penetapan areal kerja Hutan Desa dengan mensederhanakan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja hutan desa.

Departemen Kehutanan (Menhut) menargetkan sekitar 10 juta hektar areal pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan hingga tahun 2015 dengan perincian 2,5 juta hektar hutan desa; 5,4 juta hektar hutan tanaman rakyat; dan 2,1 juta hektar hutan kemasyarakatan. Namun hingga saat ini realisasi pemberian izin untuk hutan desa baru 2.356 hektar, artinya belum sampai satu persen dari target. Demikian pula untuk hutan tanaman rakyat yang saat ini baru terealisasi 25.415 hektar dan hutan kemasyarakatan sekitar 7.753 hektar.

Disamping peran pemerintah dalam kaitannya dengan status hukum, keberhasilan pengelolaan hutan tidak terlepas dari adanya kelembagaan pengelola dan dukungan pihak-pihak terkait lainnya. Keberadaan hutan desa mampu mempertahankan dan

mengangkat kembali eksistensi lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Dalam skema hutan desa, hak untuk mengelola hutan diberikan kepada lembaga lokal sehingga mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola 'Desa Hutan' sebagai mandat oleh kepala desa. Dalam hal ini individu-individu masyarakat memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skema hutan desa merupakan suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berada pada unit manajemen paling kecil (pemerintahan desa). Akan tetapi didalamnya mengandung suatu prinsip pengelolaan yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Hal yang paling mendasar adalah suatu bentuk pengelolaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan serta ditetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah. Di pihak lain, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat sebagai pemanfaat sumberdaya hutan merupakan kekuatan penggerak ("*driving force*") yang penting pula. Kesadaran masyarakat ("*public awareness*") juga menjadi kunci pokok agar sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara bijak dan lestari.

Foto: Jasnari



Potret kearifan lokal dalam tata kelola keanekaragaman hayati

Oleh Subekti Rahayu dan Harti Ningsih

“Untuk membuat pagar kebun menggunakan tanaman apa pak?” Itulah kalimat pembuka ketika kami melakukan diskusi kelompok dengan masyarakat Desa Danau, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. “Sekarang untuk pagar kebun kami sudah menggunakan kawat, karena lebih mudah dan tahan dari ancaman babi” ujar pemilik rumah. “Bagaimana dengan kayu bakar dan obat-obatan, apakah masih mencari dari kebun?” Mengapa harus bersusah payah mencari kayu bakar di hutan atau kebun karet? Kompas gas dan tabung gasnya sudah tersedia di toko dekat rumah, untuk obat-obatanpun kami tinggal pergi ke warung atau puskesmas saja” ucap peserta lainnya.

Cuplikan obrolan di atas membuat kami terkejut sekaligus prihatin. Apakah ini pertanda adanya pergeseran nilai keanekaragaman hayati? Tidak hanya keanekaragaman hayati sebagai sumber penghasil kayu bakar yang tidak dibutuhkan lagi, tetapi keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan pangan, bahan bangunan, dan obat-obatanpun dianggap kurang penting. Kayu bangunan dan buah-buahan dapat dibeli dengan mudah, asal ada uang. Apalagi hanya sekedar rotan untuk membuat keranjang. Keranjang plastik dapat mereka beli dengan mudah dan murah, sehingga mereka berpikir lebih baik mencari uang saja dengan membabat hutan dan belukar untuk dijadikan kebun karet maupun sawit.

Apakah nilai ekonomis hasil karet dan sawit sebanding dengan nilai keanekaragaman hayati di hutan yang kita miliki? Adakah upaya agar masyarakat tetap menghargai

keanekaragaman hayati di sekitarnya, ditengah gempuran modernisasi? Masih adakah masyarakat yang mengenal dan peduli akan keanekaragaman hayati? Sangat ironis jika banyak wanita muda dan separuh baya di Kabupaten Bungo, Jambi sudah tidak mengenal keanekaragaman jenis tanaman obat-obatan di daerahnya.

Apakah yang mempengaruhi kelestarian keanekaragaman hayati?

Keanekaragaman hayati menjadi topik yang sangat menarik dibicarakan, karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam kelimpahan dan komposisi akibat perubahan iklim dan penggunaan lahan. Bahkan beberapa jenis keanekaragaman hayati dinyatakan terancam punah. Namun, keanekaragaman hayati lainnya justru menunjukkan peningkatan populasi yang tidak terkendali bahkan menjadi pengganggu bagi kehidupan lainnya, misalnya menjadi hama atau gulma.

Perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim adalah faktor utama yang menyebabkan hilangnya suatu keanekaragaman hayati. Persepsi masyarakat akan pentingnya keanekaragaman hayati juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Ketika aksesibilitas dari suatu daerah semakin baik, masyarakat dengan mudah dapat menemukan bahan lain yang dapat menggantikan fungsi keanekaragaman hayati. Akibatnya masyarakat menjadi tidak peduli akan keberadaannya dan keberlangsungan hidupnya. Secara tidak langsung masyarakat juga tidak mempertahankan lahan-lahan yang menjadi sumber keanekaragaman hayati seperti hutan, agrofororest karet, dan belukar.

Hasil diskusi kelompok dengan para wanita berumur antara 20-50 tahun di tiga desa di



Diskusi kelompok yang diadakan di Desa Lubuk Beringin



Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa di Desa Danau yang memiliki akses jalan paling baik ke kota kabupaten, hanya mengetahui 28 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, sementara di Desa Tebing Tinggi dengan akses jalan sedang, mengetahui sebanyak 62 jenis dan di Desa Lubuk Beringin yang memiliki akses kurang baik mengenal 92 jenis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa yang memiliki akses ke kota kurang baik, masih memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.

Haruskah keanekaragaman hayati dikorbankan demi kemajuan industri dan pembangunan infrastruktur? Tentunya harus ada "trade-off" antara kelestarian keanekaragaman hayati dengan pembangunan, karena sebenarnya keanekaragaman hayati justru menjadi modal bagi kemajuan industri.

Mengapa keanekaragaman hayati harus dilestarikan?

Keanekaragaman hayati bukan hanya sekedar hewan dan tumbuhan yang hidup di muka bumi, tetapi harus dicermati lebih lanjut peran dan fungsinya dalam suatu ekosistem. Untuk setiap keanekaragaman hayati, meskipun hanya berupa kutu yang sangat kecil atau jamur yang tumbuh di sampah, memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Hingga saat ini masih banyak sekali keanekaragaman hayati yang belum diketahui peran dan fungsinya yang mungkin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Sebagai contoh, tanaman buah-buahan hutan memiliki potensi sebagai sumberdaya genetik yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjadi buah-buahan yang bernilai ekonomi, apalagi jika dipadukan dengan teknologi yang tepat guna. Demikian pula dengan potensi tanaman obat-obatan. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati harus dilestarikan. Tanpa upaya melestarikan, mungkin akan punah sebelum diketahui fungsi dan peranannya.

Adakah potensi insentif bagi masyarakat pelestari keanekaragaman hayati?

Melihat betapa pentingnya keanekaragaman hayati dan kecenderungan yang terjadi akhir-

akhir ini seperti di Desa Danau, perlu upaya pemberian insentif kepada masyarakat yang masih mau melestarikan keanekaragaman hayati. Insentif tersebut dapat didasarkan pada nilai penting dari keanekaragaman hayati yang ditemukan di suatu daerah.

Barangkali dapat menjadi bahan renungan, berapa nilai sebatang pohon pasak bumi yang tumbuh di belukar tua, kebun karet tua atau di hutan. Kalau ada seorang penduduk yang melestarikan belukarnya karena merupakan tempat tumbuh pohon pasak bumi, berapa atau apa insentif yang dapat diberikan?



Seorang masyarakat yang sedang mengisikan manfaat yang diperoleh dari kebun karet muda

Gaharu: pohon emas yang misterius

Oleh Bambang Soeharto

“Sudah gaharu cendana pula”, itulah ungkapan sejak ratusan tahun yang lalu. Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa gaharu dan cendana sudah dikenal sejak lama dan memiliki nilai yang hampir sama atau setara. Cendana dan gaharu merupakan kayu yang sangat tinggi nilainya yang tidak dijual dengan ukuran kubik seperti kayu-kayu lainnya, tetapi dijual dengan ukuran kilogram. Kualitasnya pun sangat bervariasi. Baik cendana maupun gaharu merupakan komoditas ekspor dan keberadaannya sangat terbatas sehingga tata niaganya pun melibatkan berbagai aturan-aturan pemerintah.

Gaharu di alam dihasilkan dari jenis pohon tertentu yang terinfeksi oleh suatu jenis fungi atau cendawan dan hasil infeksi tersebut menghasilkan gubal yang berwarna kehitaman dan berbau wangi dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jenis pohon yang dapat menghasilkan gubal – gaharu adalah dari spesies *Aquilaria malaccensis*, *Aquilaria filaria*, *Aquilaria beccariana*, *Aquilaria cumingiana*, *Aquilaria hirta*, *Aquilaria microcarpa*, *Aquilaria crassna* dan *Gyrinops leddermannii*, dengan demikian di Indonesia gaharu dikelompokkan dalam komoditas kehutanan golongan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

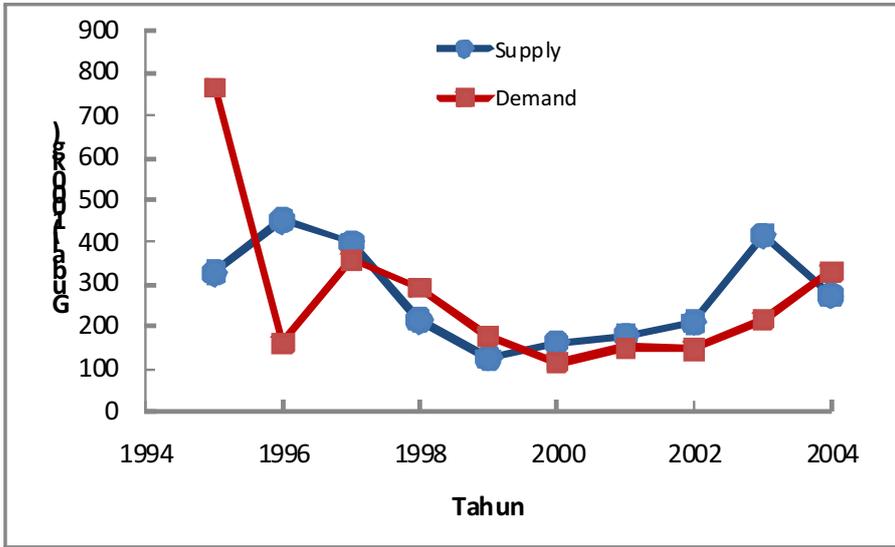
Namun tidak semua spesies *Aquilaria* dan *Gyrinops* yang tumbuh di alam menghasilkan gaharu, hanya sekitar 10-20%-nya. Karena tidak ada tanda-tanda yang spesifik pada *Aquilaria* dan *Gyrinops* yang mengandung gaharu, seringkali pemburu gaharu menebang secara asal, dengan demikian banyak pohon yang ditebang tapi tidak terdapat gaharu, akibatnya populasi di alam semakin sedikit. Bahkan LIPI melaporkan bahwa populasi tingkat pertumbuhan pohon saat ini hanya sekitar satu per hektar. Oleh karena itu, *A. malaccensis*, *A. beccariana*, *A. cumingiana*, *A. hirta*, *A. microcarpa* dinyatakan dalam status rawan dan *A.*

crassna dalam status kritis menurut IUCN Red List.

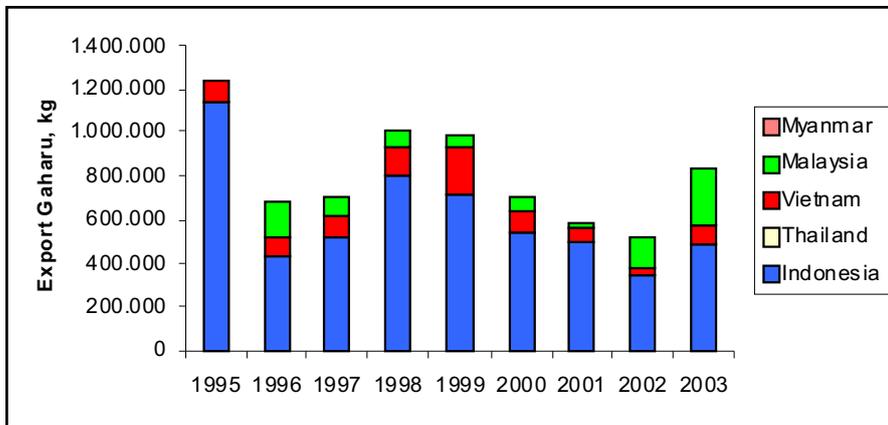
Gaharu digunakan sebagai bahan baku parfum, kosmetika, dupa, obat serta bahan penunjang untuk upacara keagamaan dan dalam perdagangan dikenal dengan nama *agarwood*, *aloewood* dan *eaglewood*. Daerah Timur Tengah, China, Korea dan Jepang merupakan Negara-negara pengimpor gaharu dari Indonesia. Beberapa negara pengimpor produk gaharu mengklasifikasikan kualitasnya dengan cara yang berbeda-beda. Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan tiga kelas



Gambar 1. Gubal gaharu kualitas kamedangan



Gambar 2. Penawaran dan permintaan gaharu di pasar dunia antara tahun 1994 – 2004



Gambar 3. Proporsi ekspor gaharu dari beberapa negara antara tahun 1995-2003

dari yang paling tinggi ke yang paling rendah yaitu kelas gubal, kelas kamedangan dan kelas abu. Dari masing-masing kelas tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub-kelas. Pada kelas gubal yang berwarna kehitaman tanpa ada campuran serat kayu, saat ini harganya berkisar Rp 35.000.000 – 40.000.000 per kilogram.

Hasil gaharu dari alam semakin menurun akibat penebangan pada masa lalu yang membabitkan karena terdorong harga yang mahal, sedangkan permintaan gaharu dunia hingga saat ini terus meningkat. Gambar 2 menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 terjadi penurunan ketersediaan produk gaharu, sementara permintaan semakin bertambah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor gaharu di pasar dunia. Antara tahun 1995-2003, sekitar 75% gaharu berasal dari Indonesia (Gambar 3).

Sebagai negara pengespor gaharu, penurunan gaharu alam di Indonesia menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekspor. Oleh karena itu, salah satu pola yang dapat dikembangkan adalah dengan budidaya gaharu dengan sistem agroforestry. Budidaya spesies penghasil gaharu tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi dari hasil gubalnya, tetapi juga berperan dalam pelestarian plasma nutfah.



Gambar 4. Gyrinops sp. dalam sistem agroforestry di Desa Pusuk, Mataram, Nusa Tenggara Timur

Hutan Sesaot: Jasa lingkungan yang belum tersingkap

Oleh Subekti Rahayu, Noviana Khususiyah, Tonni Asmawan dan Erik Setiawan

Canda tawa dan senda gurau anak-anak sambil berenang adalah pemandangan yang lumrah dijumpai di Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sekilas seperti petualangan anak dalam kisah bocah petualang di salah satu stasiun TV. Air yang jernih dan bersih, dikelilingi hijaunya pepohonan seperti magnet yang selalu menarik anak-anak untuk bermain. Sangat kontras dengan kehidupan anak-anak di kota yang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk bisa sekedar bermain di wahana air.

Penyedia air bersih

Air jernih di sepanjang Kali Sesaot merupakan satu indikator bahwa sumber air di bagian hulu masih terpelihara dengan baik. Identifikasi lapangan yang dilakukan oleh ICRAF menemukan sebanyak 56 sumber mata air yang bermuara ke Kali Sesaot, Kali Jangkok, Kali Tembiras, Kali Pemoto, Kali Bentoyang, Kali Betung dan Kali Bensusue. Mata air Ranget dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM untuk memenuhi sekitar 98.000 pelanggan di Kota Mataram. Air Kali Jangkok digunakan untuk irigasi sampai ke daerah Lombok Tengah. Apa yang akan terjadi jika air dari kawasan Sesaot mengering dan menghilang?

Kelestarian sumber-sumber air di daerah hulu hutan Sesaot tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal masyarakat dalam menanam kayu dan buah-buahan. Kayu dan buah-buahan memiliki pola perakaran yang membantu infiltrasi air hujan agar tersimpan dalam tanah, mampu mempertahankan tanah dari erosi dan longsor, serta menghasilkan seresah yang merupakan sumber bahan organik tanah.

Meskipun kawasan hutan Sesaot menyediakan jasa berupa sumber air yang begitu besar, namun hingga saat ini belum ada mekanisme imbal jasa lingkungan bagi masyarakat di daerah hulu sebagai pemelihara kelestarian hutan dalam menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi.

Penyerap karbon

Kawasan hutan Sesaot saat ini terbagi menjadi kawasan hutan primer, hutan sekunder, perkebunan mahoni dan agroforestri dengan berbagai jenis tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman pangan tahunan. Agroforestri pada kawasan ini dikembangkan oleh masyarakat dari lahan alang-alang dan hutan sekunder bekas tebangan yang ditinggalkan oleh perusahaan pengelola sekitar tahun 1976.

Tegakan tanaman kayu, buah-buahan dan tanaman pangan setahun

memberikan sumbangan terhadap cadangan karbon yang cukup berarti yaitu antara 40 sampai 60 ton per hektar pada umur kebun antara 10 sampai 20 tahun. Bahkan di perkebunan mahoni yang berumur 50 tahun, cadangan karbonnya mencapai 350 ton per hektar atau setara dengan cadangan karbon pada hutan primer.

Komitmen masyarakat untuk menjaga kawasan perkebunan mahoni, maupun mempertahankan pohon-pohon durian tua berumur ratusan tahun di kawasan ini dan juga melakukan penanaman kayu serta buah-buahan di lahan yang mereka kelola tentu akan menambah tingginya cadangan karbon.

Apakah implikasinya bila cadangan karbon bertambah? Pertambahan cadangan karbon memiliki peran yang sangat berarti dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang saat ini sedang



dibicarakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Potensi pasar karbon bagi daerah ini menjadi suatu peluang apabila mampu mempertahankan atau bahkan menambah cadangan karbonnya.

Keindahan alam

Tegakan mahoni yang masih dilestarikan memiliki potensi sebagai kawasan wisata dan menciptakan suasana sejuk seperti di hutan alam. Apalagi dengan adanya sumber mata air Aek Nyet menambah keindahan tempat ini. Pada hari libur, banyak pengunjung datang untuk menikmati sejuknya kawasan ini. Ke depannya perlu upaya pengelolaan berkaitan dengan potensi wisata tersebut sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan dan kesejukan alam secara cuma-cuma.

Benar-benar kehidupan yang menyenangkan, air, udara bersih dan keindahan alam masih dapat dinikmati secara gratis di kawasan ini. Akankah semuanya mampu bertahan?

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dari ketiga uraian di atas, kawasan hutan Sesaot masih mampu menyediakan sumber air bersih, udara bersih dan keindahan alam. Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya? Idealnya, harus ada keseimbangan antara kelestarian lingkungan biofisik dengan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan hutan Sesaot saat ini dikelola oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani HKm. Di kawasan ini ada empat kelompok HKm (KMPH, Wana Lestari, Wana Darma dan Wana Abadi), namun baru satu kelompok yang sudah mendapatkan ijin HKm dari Bupati. Lahan garapan tersebut mereka peroleh dengan cara pembagian, membuka langsung dari belukar tua, dan mengganti rugi. Dalam pengelolaannya, setiap anggota kelompok diharuskan menanam pohon dengan proporsi 70% tanaman multiguna (MPTs) dan 30% tanaman kayu-kayuan.

Meskipun sudah ada persyaratan dalam pengelolaan lahan, tetapi menurut Rahmat Sabani, Direktur Konsepsi, saat ini proporsi tanaman yang dibudidayakan masyarakat masih belum memenuhi target dalam upaya pelestarian fungsi hutan. Memang, kondisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya yang hanya berupa lahan campuran antara alang-alang dan belukar.

Seorang petani di kawasan ini juga mengaku, bahwa dalam dua tahun terakhir ini mereka banyak melakukan penanaman pohon durian. Harapannya, dalam 10 tahun mendatang kawasan hutan Sesaot menjadi penghasil durian untuk daerah Lombok Barat.

Secara ekonomi, saat ini kondisi masyarakat pengelola lahan HKm Sesaot sudah lebih baik, karena

tanaman buah-buahan (durian, kemiri, rambutan, manggis, alpukat) sudah mulai menghasilkan buah. Demikian pula tanaman coklat, kopi dan pisang yang memberikan kontribusi pendapatan cukup besar bagi rumah tangga. Saat ini kawasan ini menjadi penghasil pisang untuk memasok ke daerah Bali, terutama pada saat hari raya umat Hindu. Pisang yang dihasilkan dari kawasan ini cukup banyak dan kualitasnya bagus.

Sumber pendapatan terbesar petani (lebih dari 50%) di kawasan Sesaot berasal dari hasil tanaman agroforestri di hutan HKm. Pendapatan lain adalah tenaga upahan dan sumber lain hanya memberikan kontribusi kecil. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapat menyelaraskan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan harus dilakukan. Apakah mekanisme imbal jasa lingkungan menjadi suatu jalan tengah? Pekerjaan rumah untuk mencari jalan tengah inilah yang perlu kita kerjakan bersama-sama demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan implementasi imbal jasa lingkungan di Lombok Barat

Potensi jasa lingkungan di kawasan hutan Sesaot sudah menjadi bahan pemikiran bagi lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat. Pada tahun 2007, KONSEPSI, WWF, Dinas Kehutanan dan kelompok masyarakat mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 2007 tentang pengelolaan jasa lingkungan dan diikuti penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Lombok Barat dengan pihak PDAM Menang-Mataram pada bulan November 2009 tentang pembayaran jasa lingkungan sebesar Rp.1000 setiap bulan kepada 59.000 pelanggan PDAM. Dana ini dikelola oleh Institusi Multi Pihak (IMP) untuk menjamin daerah sumber mata air yang berada di kawasan Hutan Sesaot tetap lestari. Dana ini juga digunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat sekitar Desa Sesaot, seperti Desa Lebah Sempage, Batu Mekar dan Sedau.



Berbagi pengalaman uji coba perangkat kaji cepat dalam menilai lansekap

Oleh Diah Wulandari, Kurniatun Hairiah, dan Ni'matul Khasanah



Foto: Kurniatun Hairiah

Sebanyak 42 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Indonesia, Philippina, Vietnam, Thailand, Kenya, Peru, Jerman dan Malaysia bertemu dalam acara semiloka TUL-SEA pada tanggal 22-26 Februari 2010 di Kota Batu dan Mojokerto, Jawa Timur. "Para peserta yang hadir merupakan anggota jaringan pertemanan internasional dalam agroforestri (INAF-International Network of Friends of Agroforestry)" ungkap Dr. Meine van Noorwijk, chief science advisor, ICRAF.

TUL-SEA (Trees in multi-Use Landscapes in South East Asia) adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan mengembangkan kapasitas nasional dalam menggunakan alat bantu untuk mengevaluasi secara cepat produktivitas pertanian dan jasa lingkungan pada berbagai bentang lahan yang berbasis pohon. Dalam waktu 2.5 tahun proyek berjalan, ICRAF dan Universitas Hohenheim, Jerman dengan beberapa mitra dari

LSM, lembaga penelitian, pemerintahan, maupun universitas di tingkat nasional telah melakukan kegiatan bersama baik melalui pelatihan maupun aplikasi langsung di lapangan.

Kegiatan semiloka yang diselenggarakan oleh ICRAF dengan Universitas Brawijaya (UB) bertujuan untuk:

- (1) melakukan evaluasi dan sintesis hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan
- (2) membangun ide bersama untuk rencana-rencana selanjutnya.

Semiloka tersebut dibagi menjadi dua tahapan yaitu, tahap pertama antara tanggal 22-23 Februari 2010 berupa pemaparan singkat kondisi bentang lahan di Asia Tenggara (Sumatera-Indonesia, Lantapan-Philippina, Mae Wang-Thailand, dan Bac Kan-Vietnam) beserta hasil-hasil implementasi; tahap kedua antara tanggal 24-26 Februari

2010 diisi dengan acara diskusi berbagi pengalaman sekaligus sintesis metode yang telah dicoba dan rencana proyek di masa mendatang.

Selain pemaparan kondisi lansekap di berbagai lokasi, kegiatan tahap pertama juga diisi dengan kunjungan lapang ke sub-DAS Brantas di Kali Konto.

Kunjungan ke DAS Kali Konto

DAS Kali Konto dengan luas 23,810 ha, terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tutupan lahan yang umum dijumpai di wilayah ini adalah perkebunan pinus (*Pinus merkusii*), mahoni (*Swietenia mahogany*) dan damar (*Agatis philippensis*). Luasan hutan alam di DAS Konto terus mengalami penurunan karena dikonversi menjadi lahan pertanian semusim, sehingga cadangan carbon, keragaman hayati dan fungsi ekologisnya juga ikut menurun.

DAS Kali Konto adalah salah satu lokasi studi untuk implementasi perangkat kaji cepat penilaian lansekap yang merupakan bagian dari TUL-SEA. Perangkat yang diimplementasikan di DAS Kali Konto adalah kaji cepat penilaian cadangan karbon (RaCSA) dan kaji cepat penilaian keanekaragaman hayati (RABA).

Dalam kaitannya dengan hasil implementasi kedua perangkat kaji



Dr. Meine van Noorwijk, ketika memberikan presentasi pembuka



Peserta melihat dan berdiskusi langsung di agroforestry kopi Ngantang. (Foto: Meine van Noordwijk)

cepat di DAS Kali Konto, maka selama kunjungan, para peserta mendapatkan informasi mengenai pentingnya keanekaragaman tanaman yang ditanam untuk menjaga keragaman hayati dalam tanah. Keragaman hayati tanah ini bermanfaat bagi petani dalam peranannya sebagai penyediaan hara, pengemburan tanah melalui pembentukan pori tanah, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

Pada kaji cepat keanekaragaman hayati di DAS Kali Konto, tiga jenis hewan yang dievaluasi adalah cacing tanah yang secara tidak langsung dapat memperbaiki kondisi DAS melalui kemampuannya dalam mempertahankan porositas dan infiltrasi tanah; pengendalian hama rayap dan nematoda.

Para peserta kunjungan lapang dijamu dengan buah-buahan yaitu manggis dan durian hasil dari kebun agroforestri di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngantang yang berada di DAS Kali Konto. "Manggis di sini lebih manis daripada yang di Filipina", begitulah ungkap Grace, salah satu peserta dari Filipina sambil terus menikmati beberapa buah manggis.

Kunjungan ke DAS Sumber Brantas

Dari Ngantang, peserta melanjutkan perjalanannya menuju DAS Sumber Brantas yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. DAS Sumber Brantas telah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas air, sehingga dijadikan sebagai lokasi implementasi kaji cepat terhadap hidrologi (RHA). Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat lokal, pemerintah maupun para peneliti terhadap kondisi hidrologi di DAS Sumber Brantas tidak jauh berbeda. Bencana banjir dan kekeringan, menurunnya jumlah dan

debit mata air, menurunnya kualitas air, serta banyaknya kejadian erosi dan longsor terjadi di lokasi ini. Hal ini disebabkan karena tingginya perbedaan debit antara musim kemarau dan musim hujan serta sempitnya luasan hutan.

Pada akhir kunjungan, peserta berkesempatan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan lokal dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan lahan/lingkungan.

Dipenghujung acara dilakukan diskusi untuk menarik kesimpulan terhadap seluruh kegiatan serta rencana kegiatan TUL-SEA selanjutnya. Peserta menilai bahwa semiloka yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan mengusulkan metode yang ada dapat dikembangkan lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi dari berbagai negara. Salah satu hasil akhir dari kegiatan semiloka ini adalah rencana menerbitkan buku TUL-SEA.



Durian Ngantang TOP... pahit dan legit! Kata Mr. Nguyen Vu Linh dari Vietnam

Pak Achmad, petani penangkar durian jenis lokal untuk dikembalikan ke habitat aslinya di Ngantang (Foto: Kurniatun Hairiah dan Meine van Noordwijk).



Atas: Pemaparan hasil kaji cepat jasa lingkungan kepada para pihak terkait di Balai Desa Punten (Foto: Meine Van Noordwijk)

Tengah: Berbagi pengalaman antar peserta dalam uji coba alat bantu evaluasi jasa lingkungan (Foto: Kurniatun Hairiah)

Bawah: Foto bersama peserta semiloka mengakhiri kunjungan lapangan di desa Ngantang (Foto: Meine van Noordwijk)



Konferensi ASFN 2010: Mengangkat peran ASEAN di dalam perhutanan sosial dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan di dalam menghadapi perubahan iklim

Oleh Amelia Britaniari



Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan, Deputy Secretary-General of ASEAN, H.E. Mr. Sundram Pushpanathan, Swiss Ambassador, H.E. Mr. Heinz Walker-Nederkoorn bersama dengan Direktur Jenderal RLPS Kementerian Kehutanan RI berpose dengan Kepala Delegasi dan ASFN Leader Negara ASEAN pada ASFN Conference 2010 di Yogyakarta

Kota Budaya Yogyakarta menjadi lokasi diselenggarakannya Konferensi dan Sidang tahunan ASFN yang ke empat. Acara ini berlangsung selama tiga hari dengan mengangkat tema utama: "Perhutanan sosial dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan di dalam menghadapi perubahan iklim. Konferensi ASFN ini terdiri dari dua hari presentasi dan diskusi sesi umum serta diskusi kelompok, dilanjutkan dengan satu hari dialog lapangan ke beberapa lokasi perhutanan sosial di sekitar Yogyakarta.

Konferensi ini juga menampilkan ASFN Knowledge Fair, dimana negara

anggota ASEAN dan organisasi mitra lokal/sub nasional/nasional dari negara tuan rumah berpartisipasi dan menampilkan produk serta program yang berkaitan dengan tema utama ASFN Conference 2010.

Tujuan diselenggarakannya Konferensi ini adalah untuk mengumpulkan pengalaman dan menyusun rekomendasi sebagai langkah maju untuk:

- mempercepat pelaksanaan program-program perhutanan sosial yang berhasil dan berkelanjutan;

- mengukur dan mempromosikan kontribusi dari perhutanan sosial untuk ketahanan pangan melalui pemanfaatan hutan yang lestari, efisien dan efektif dengan cara mengurangi resiko-resiko dan akibat-akibat dari penggunaan hutan tersebut;
- mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dari berhasilnya program-program perhutanan sosial di kawasan ASEAN.

Dalam sambutan tertulisnya pada pembukaan Konferensi, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan bahwa "kondisi kehutanan saat ini dalam keadaan kritis, untuk memperbaiki keadaan tidak ada pilihan lain selain dari pengaturan hutan yang tepat untuk hutan primer, memperbanyak aktifitas rehabilitasi hutan dan penegakkan hukum yang tegas. Sudah seharusnya kita berhenti menebang pohon di hutan primer dan berhenti memberikan ijin untuk hutan rawa gambut yang telah dilakukan sejak Oktober 2009". Pada kesempatan itu, Bapak Menteri menghimbau peserta Konferensi untuk menyusun rekomendasi untuk usaha-usaha mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan.

Dalam rangka memperkuat tema besar ini, negara-negara ASEAN bersepakat untuk fokus pada ketahanan pangan sebagai isu dan kebijakan prioritas utama dengan cita-cita bersama ASEAN untuk mencapai tujuan dari KTT Pangan Dunia (World Food

Summit) dan Millenium Development Goal (MDGs). Perhutanan sosial bukan untuk pertama kalinya dibahas oleh ASEAN pada ASFN Conference 2010 di Yogya ini. ASEAN membahas tentang perhutanan sosial dan diperlukannya suatu kerjasama tingkat ASEAN di bidang perhutanan sosial, pada Sidang Ke-6 ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF) di Viet Nam, tahun 2003. Terbentuknya ASFN ditetapkan oleh ASOF pada Sidang Ke-8 ASOF di Phnom Penh, 2005, dan sejak itu Sidang Tahunan diselenggarakan di Semarang, Bangkok, Subic, dan Yogyakarta. Tema utama yang diangkat pada Konferensi ASFN 2010 merupakan respon terhadap **ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry towards Food Security (AFCC)** yang telah disahkan oleh ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada November 2009 di Bandar Seri Begawan sebagai tindak lanjut ASFN yang merupakan salah satu Badan kerjasama sektoral ASEAN yang melapor kepada ASOF dan selanjutnya kepada Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF), di dalam memajukan usaha untuk mencapai tujuan utama dari AFCC: *untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan melalui penggunaan lahan, hutan, air dan sumber daya akuatik yang efisien, efektif dan berkelanjutan, dengan cara meminimalisir resiko dan dampak dari, serta kontribusi terhadap, perubahan iklim.*

Peserta Konferensi ASFN yang datang dari lembaga pemerintahan dan

ajarannya, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penelitian, akademik, tokoh masyarakat desa, praktisi dan pakar-pakar di bidangnya, merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

- Membuat langkah maju sebagai agenda ASFN untuk beberapa tahun ke depan dan merumuskan sinergi dengan mitra jejaring lainnya di dalam mencapai tujuan tersebut;
- Mendukung langkah-langkah di dalam memperkuat jejaring perhutanan sosial di tingkat nasional;
- Membentuk suatu pengertian yang dapat diterima secara regional terhadap peran perhutanan sosial terhadap usaha-usaha adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan;
- Bergabung secara aktif dalam diskusi dan formasi regional;
- Membentuk kerjasama yang strategis dengan berbagai institusi yang terkait dengan pengumpulan pengetahuan, sharing, dan distribusi terhadap produk-produk pengetahuan mengenai perhutanan sosial;
- Menangkap dan membagi pengalaman terbaik dan lessons learned melalui distribusi dan komunikasi ke badan-badan yang relevan di ASEAN (AMAF, ASOF, ARKN-FCC, ARKN-FLEG, dll), dan
- Memperkuat koordinasi dan mekanisme kelembagaan untuk mengoperasikan reformasi kebijakan

dan secara aktif berpartisipasi dan mengajak dalam proses dialog REDD-plus.

Bapak Suyanto, Principal Scientist ICRAF Southeast Asia memberikan presentasi berjudul "Negotiation Support System (NSS) Methods for Social Forestry in Mitigating and Adapting to Climate Change through Enhanced Carbon Stock". ICRAF, yang terwakili oleh Ibu Tikah Atikah, Information Unit Leader, dan Melinda Firds dari bagian Publikasi, berpartisipasi dalam ASFN Knowledge Fair. ICRAF menyampaikan rekomendasi dari perspektif metode. Pada sesi yang sama, CIFOR, memberi rekomendasi terkait kebijakan, RECOFTC memberi rekomendasi terkait capacity building, dan ASEAN Regional Knowledge Network on Forests and Climate Change (ARKN-FCC) memberikan rekomendasi terhadap kegiatan sinergi yang dapat direalisasikan dalam waktu dekat antara ASEAN dan ARKN-FCC.

Konferensi ASFN yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan ASFN Secretariat pada tanggal 14-16 Juni 2010 di dalam rangka Sidang Tahunan ke-4 ASFN pada tanggal 17-18 Juni 2010 di Yogyakarta, mendapat dukungan pendanaan kegiatan dari Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Kementerian Kehutanan RI, dan Multistakeholder Forest Program Phase 2 (MFP2DFID). Dokumentasi dari Konferensi tersebut beserta Program Acara dapat diakses di: <http://www.asfnsec.org/>



Kiri: Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan mengunjungi salah satu booth pameran pada ASFN Knowledge Fair. **Kanan:** Salah satu pojok ASFN Knowledge Fair

❖ Konferensi Internasional Ilmu Lingkungan dan Aplikasinya

10 - 12 September 2010
Singapura

Tujuan dari Konferensi Internasional Ilmu Lingkungan dan Aplikasinya adalah untuk menyediakan forum untuk berdiskusi dalam pembaharuan prinsip pendekatan Ilmu Lingkungan dan Penerapannya. Maka dari itu pertemuan ini bertujuan untuk menarik peserta dari berbagai latar belakang, untuk mendukung kerjasama antara berbagai bidang penelitian yang berbeda, untuk mengungkapkan dan berdiskusi tentang teori yang inovatif, kerangka, metodologi, alat dan aplikasinya.

Konferensi Internasional Ilmu Lingkungan dan Aplikasinya di sponsori juga oleh Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBES) dan International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT).

Informasi lebih lanjut:
E-mail: iceea@vip.163.com
Website: <http://www.iceea.org>

❖ Seminar Internasional Pemukiman Tropis yang Berwawasan Lingkungan

5 – 7 November 2010
Bali, Indonesia

The Research Institute for Human Settlements (RIHS) akan melaksanakan Seminar Internasional 2010 sebagai bagian dari rangkaian Seminar Internasional Pemukiman berwawasan lingkungan yang telah diorganisasi sejak 2006. Dalam hal ini, RIHS secara resmi menerima dan mengundang para pemangku kepentingan untuk saling berbagi pekerjaan-pekerjaan penelitian asli dan belum terbit, laporan-laporan kasus, dan ulasan mengenai pembangunan infrastruktur hijau.

Informasi lebih lanjut:
Lucky Adhyati Prasetyorini
Telp. +62 85 62142140
E-mail: ecosettlements_seminar@puskim.pu.go.id
Website: http://puskim.pu.go.id/ecosettlements_seminar/

❖ Simposium Ilmiah Nasional 2010

10 November 2010
Bogor, Indonesia

Tujuan dari penyelenggaraan simposium ilmiah ini yaitu untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta para peneliti, akademisi, dan para profesional di bidang Arsitektur Lanskap serta bidang terkait pada upaya mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dan bencana alam, melalui pendekatan konservasi dan penataan ruang.

Untuk itu Panitia mengundang karya tulis ilmiah dan poster para Arsitek Lanskap seluruh Indonesia, dan kesempatan ini juga dibuka bagi para ahli dari bidang profesi lain yang terkait, seperti Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Perencanaan Wilayah, Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.

Simposium ini diharapkan menjadi media diseminasi hasil karya dan pemikiran ilmiah, dan juga menjadi media komunikasi antara para arsitek lanskap Indonesia dan antara profesi arsitek lanskap dengan profesi dari bidang lain yang terkait dengan penataan ruang dan konservasi.

Informasi lebih lanjut:
Panitia Simposium Ilmiah Nasional IALI
Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telp. & Fax : 0251 8422415
E-mail: simposium_iali@yahoo.co.id
Website: www.simposiumiali.wordpress.com

RaTA: A Rapid Land Tenure Assessment manual for identifying the nature of land tenure conflicts

Gamma Galudra, Martua Sirait, Gamal Pasya, Chip Fay, Suyanto, Meine van Noordwijk dan Ujjwal Pradhan



Buku manual ini ditulis berdasarkan studi kasus di Indonesia dan pengetahuan yang terkait. Sasaran utamanya adalah:

- Memberikan pengetahuan praktis tentang hubungan antara kepemilikan tanah dan hak kepemilikan tanah, apakah fungsi isu hak kepemilikan tanah dibicarakan secara sebab akibat atau faktor konflik yang terjadi, atau apakah kita berpikir kalau hak kepemilikan tanah timbul setelah konflik yang terjadi.
- Untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan kepemilikan tanah melalui pemahaman yang lebih baik agar sistem kepemilikan tanah menjadi dinamis dan memihak banyak pihak.
- Mengenalkan kepada para pelaksana dan para pihak terkait dan membuat para petugas mengetahui bahwa fakta dari kebijakan yang membingungkan secara tidak sadar dapat menyebabkan merebaknya persaingan atas hak kepemilikan tanah.

Target pembaca manual ini adalah para ahli yang bekerja di institusi lokal yang mengurus masalah konflik tanah dan persaingan menuntut hak, LSM yang ahli di bidangnya, dan para petugas pemerintah. Manual ini juga bertujuan untuk membantu para ahli dan konsultan yang sedang bekerja di bidang konflik tanah, sedang dalam penelitian kepemilikan tanah, dan sedang menyusun kebijakan kepemilikan tanah.

Sistem informasi geografis untuk pengelolaan bentang lahan berbasis sumber daya alam. Buku 2 analisa spasial untuk perencanaan wilayah yang terintegrasi menggunakan ILWIS open source

Sonya Dewi, Andree Ekinadina dan Feri Johana



Buku ini disusun berdasarkan materi pelatihan yang dipersiapkan untuk Aceh Barat dan berdasarkan pengalaman serta masukan yang diterima dari berbagai pihak. Materi dari buku ini diharapkan berguna bagi para praktisi maupun para pihak yang terlibat secara formal maupun tidak formal dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang, atau siapapun yang tertarik untuk mengetahui dan menggunakan Penginderaan Jarak Jauh (PJ) dan Sistem Informasi Geografis (SIG), terutama yang

berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Sebisa mungkin kami mencari data dan perangkat lunak yang tak berbayar akan tetapi layak digunakan sesuai keperluannya, dalam rangka mengurangi kendala dana. Materi dibagi menjadi dua; buku pertama bertujuan memberikan bekal teknis dasar PJ dan SIG, sedangkan buku kedua lebih diarahkan kepana aplikasi PJ dan SIG untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan bentang lahan berbasis SDA.

Informasi:

Melinda Firds (Amel)
Telp: (0251) 8625415 ext. 756; Fax: (0251) 8625416
email: icrafseapub@cgiar.org
www.worldagroforestry.org/sea/publications